



## Penerapan Akuntabilitas terhadap Realisasi Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Dasar Swasta Islam Terpadu Ibu Harapan Bengkalis

Kiki Candri<sup>1</sup>, Mashuri<sup>2</sup>, Sri Rahmany<sup>3</sup>, Iswandi<sup>4</sup>

STIE Syari'ah Bengkalis

[kikicandri0@gmail.com](mailto:kikicandri0@gmail.com) , [mashurymr@gmail.com](mailto:mashurymr@gmail.com) , [srirahmanyahra@gmail.com](mailto:srirahmanyahra@gmail.com) ,  
[iswandydoelkend97@gmail.com](mailto:iswandydoelkend97@gmail.com)

Alamat : Sungai Alam, Kec. Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Riau 28714

Korespondensi: [kikicandri0@gmail.com](mailto:kikicandri0@gmail.com)

**Abstract:** *This study aims to determine the accountability for the realization of the school operational assistance fund budget at the Integrated Islamic Private Elementary School Ibu Harapan Bengkalis. This study uses a descriptive qualitative research method where data collection uses interview and documentation techniques. The test results show that accountability for the realization of the school operational assistance fund budget has not been carried out perfectly, due to several factors that have caused this to happen. So that the accountability of the financial reports produced is not in accordance with the technical instructions for the School Operational Assistance (BOS) guidelines.*

**Keywords:** *Accountability, Budget Realization of School Operational Assistance Fund (BOS), Financial Report.*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menentukan akuntabilitas realisasi anggaran dana bantuan operasional sekolah di Sekolah Dasar Swasta Islam Terpadu Ibu Harapan Bengkalis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dimana pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.. Hasil pengujian menunjukkan bahwa akuntabilitas realisasi anggaran dana bantuan operasional sekolah belum begitu sempurna dijalankan, dikarenakan beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Sehingga akuntabilitas laporan keuangan yang dihasilkan belum sesuai dengan petunjuk teknis panduan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

**Kata kunci:** Akuntabilitas, Realisasi Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Laporan Keuangan.

### PENDAHULUAN

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu kunci bagi terwujudnya *good governance* dalam pengelolaan organisasi publik, jika siklus akuntansi sektor publik diakhiri dengan proses pertanggungjawaban publik, proses inilah yang menentukan penilaian keberhasilan sebuah organisasi publik dalam mencapai tujuannya. Akuntabilitas kinerja telah menjadi salah satu item yang tercantum didalam dasar hukum atau aturan organisasi, karenanya, organisasi diwajibkan secara hukum untuk memenuhi akuntabilitas organisasinya dengan kinerja yang di perolehnya. Kinerja organisasi dapat diraih dengan mengefektifkan dan mengefensiensikan hasil dari proses organisasi. Yakni perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, pengendalian dan jasa, pelaporan keuangan, audit, serta pertanggungjawaban publik.

Akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pemakai lainnya sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah

*Received Januari 20, 2024; Accepted Februari 28, 2024; Published Maret 31, 2024*

\* Kiki Candri, [kikicandri0@gmail.com](mailto:kikicandri0@gmail.com)

atas seluruh aktivitas yang dilakukan, bukan hanya aktivitas finansialnya saja tetapi menekankan bahwa laporan keuangan pemerintah harus dapat memberikan informasi yang dibutuhkan para pemakainya dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Dalam menghadapi akuntabilitas tersebut, pemerintah perlu memperhatikan beberapa hal, antara lain anggaran, pengendalian akuntansi, efektivitas pelaksanaan anggaran dan sistem pelaporan.

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berwenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Akuntabilitas merupakan istilah yang berasal dari kata *account* yang berarti catatan atau laporan dan *ability* yang berarti kemampuan. Akuntabilitas (*accountability*) secara umum dapat diartikan suatu bentuk pertanggung jawaban. Organisasi yang *accountable* adalah organisasi yang mampu menyajikan informasi secara terbuka mengenai keputusan- keputusan yang telah diambil dan memungkinkan pihak luar mereview informasi tersebut, serta bila dibutuhkan harus ada kesediaan untuk mengambil tindakan kreatif.

Pertanggung jawaban kebijakan dan aturan-aturan yang dibuat oleh sekolah tentunya harus sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. Perencanaan yang sudah ditetapkan akan menjadi dasar untuk membangun prinsip akuntabilitas. Seperti yang dikemukakan oleh Surya Darma dalam Sutedjo bahwa ada tiga pilar utama yang menjadi prasyarat terbangunnya akuntabilitas, yaitu:

1. Adanya transparansi para penyelenggara sekolah dengan menerima masukan dan mengikutsertakan berbagai komponen dalam mengelola sekolah.
2. Adanya standar kinerja di setiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya.
3. Adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah dan pelayanan yang cepat.

Menurut Dwi Martani, laporan keuangan memiliki beberapa karakteristik utama yaitu adalah relevan, andal dan dapat dipahami. Karakteristik tersebut harus dipenuhi agar laporan keuangan bermanfaat bagi pengguna untuk pengambilan keputusan.

Dari beberapa paparan ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas di dalam manajemen keuangan berarti penggunaan uang sekolah yang dapat di

dipertanggungjawabkan sesuai dengan rencana yang telah dibuat dan dilaporkan kepada pemerintah, orang tua, dan masyarakat.

Akuntabilitas bertujuan untuk menciptakan kepercayaan publik terhadap sekolah. Pengelolaan manajemen sekolah yang baik akan berdampak pada kepercayaan publik yang baik pula. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa terciptanya kepercayaan publik selalu berbanding lurus dengan apa yang telah dilakukan oleh sekolah. Selain itu tujuan akuntabilitas adalah untuk menilai kinerja sekolah dan kepuasan publik terhadap pelayanan pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah, untuk mengikut sertakan publik dalam pengawasan pelayanan pendidikan, dan untuk mempertanggung jawabkan komitmen pelayanan pendidikan kepada publik.

Dari adanya uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan akuntabilitas menciptakan kepercayaan stakeholders dalam pengelolaan keuangan, menetapkan tujuan dan sasaran yang tepat, dan menggunakan standar dalam proses dan tujuan kegiatan.

Akuntabilitas berkaitan dengan pemenuhan kewajiban yang dilihat konsep kepemilikan. Pertanggungjawaban begitu ditekankan dengan perintah Allah melalui istilah hisab atau perhitungan (akuntabilitas) di hari pembalasan. Seperti tertera dalam surat Thaha ayat 6:

لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرِي ۙ ٦

Artinya : “ kepunyaan-Nyalah semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, semua yang ada di antara keduanya, dan semua yang ada di bawah tanah” (QS Ta Ha :6)

Akuntabilitas dalam perspektif Islam muncul dari konsep khalifah yang menganggap manusia sebagai pemimpin di muka bumi dengan selalu menggunakan pedoman al-Qur’an dan Hadits sebagai sumber hukum utama dalam Islam. Akuntabilitas kedua terjadi karena suatu perjanjian antara pemilik atau investor dengan manajer. Dan pada tataran prakteknya akuntabilitas erat kaitannya dengan transparansi laporan keuangan. Dalam upaya membentuk entitas syariah yang memiliki laporan keuangan dengan akuntabilitas tinggi, maka diperlukan suatu standar akuntansi yang objektif, dapat dibandingkan, transparan dan sesuai dengan prinsip syariah.

Pertanggungjawaban begitu ditekankan dengan perintah Allah melalui istilah hisab atau perhitungan (akuntabilitas) di hari pembalasan. Adanya akuntabilitas akan membuat perusahaan lebih memperhatikan kepentingan sosial. Adanya akuntabilitas menurut perusahaan lebih memperhatikan stakeholders dan lingkungan daripada stockholders semata. Akuntabilitas mencerminkan bahwa segala bentuk pertanggungjawaban yang diusung oleh

perusahaan benar-benar berdasarkan kenyataan riil yang terjadi dalam perusahaan, tidak ada yang ditutup-tutupi apalagi dimanipulasi. Semuanya diharapkan sesuai dengan semangat kejujuran dan nilai-nilai syariah. Jadi bisa disimpulkan bahwa, dalam Islam, setiap muslim dituntut bertanggungjawab atas segala tindakannya pada Allah, penciptanya, pada hari kebangkitan nanti. Hal ini berbeda dari konsep akuntabilitas barat yang hanya mencakup akuntabilitas antar manusia. Dalam Islam, pertanggungjawaban manusia tidak hanya antar manusia tapi juga pada Allah. Setiap muslim yang taat akan mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya baik dengan sepengetahuan orang lain atau tidak, karena ia tahu Allah Maha Mengetahui apapun yang ia lakukan. Karena pertanggungjawaban muslim kepada Allah, maka ia dituntut untuk melaksanakan semua aktivitasnya sesuai dengan aturan yang telah Allah tetapkan. Cara hidup seorang muslim sudah diatur oleh Allah lewat Syariah Islam yang tertuang dalam Quran dan Hadist.

Menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi Yuddy Chrisnandi (Kompas, 4, januari 2016) terkait dengan masalah akuntabilitas Penyerahan laporan hasil evaluasi kinerja memiliki arti yang sangat penting dalam membangun budaya kinerja di lingkungan instansi pemerintah. Budaya ini harus secara konsisten diterapkan melalui penerapan manajemen kinerja yang memfokuskan pelaksanaan tugas dan fungsi harus memberikan hasil yang bermanfaat bagi publik/masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Setidaknya tahun ini, rata-rata nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah minimal harus 70.

Berdasarkan penjelasan UU No 17 tahun 2003, anggaran adalah alat akuntabilitas manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan. Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran untuk membangun kepercayaan publik pada pemerintah daerah. Dengan mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan dalam bentuk anggaran maka diharapkan laporan pertanggungjawaban keuangan bisa lebih akuntabel sehingga mendapatkan dukungan publik.

Menurut Peraturan Mendiknas Nomor 69 Tahun 2009, “Dana BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Kemudian Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017

“Dana BOS adalah program pemerintah pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah”.

Menurut Fauzan “Dana BOS adalah nilai rupiah dari seluruh sumber daya pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang digunakan untuk kegiatan pendidikan”. Dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Dana BOS adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membiayai operasional satuan pendidikan sebagai pelaksana program wajib belajar.

Secara khusus program BOS bertujuan untuk (Permendiknas no 37 tahun 2010 tentang petunjuk teknis BOS tahun 2011):

- a) Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD negeri dan SMP negeriterhadap biaya operasi Sekolah, kecuali pada rintisan Sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan Sekolah bertaraf internasional (SBI).
- b) Membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di Sekolah negeri maupun swasta.
- c) Meringankan beban biaya operasi Sekolah bagi siswa di Sekolah swasta.

Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tujuan BOS pada SD/SMP/SMA/SMK/SMALB secara umum untuk :

- a. Membantu biaya operasional sekolah non personalia.
  - b. Meningkatkan angka partisipasi kasar.
  - c. Mengurangi angka putus sekolah.
  - d. Mewujudkan keberpihakan Pemerintah Pusat (*affirmative action*) bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu dengan membebaskan (*fee waive*) dan/atau membantu (*discount fee*) tagihan biaya sekolah dan biaya lainnya di SD/SMP SMA/SMK/SMALB sekolah
1. Memberikan kesempatan yang setara (*equal opportunity*) bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu; dan/atau
  2. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran disekolah.

Kebijakan dana BOS diawali dari adanya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada tahun 2005 yang mengakibatkan pemerintah melakukan pengurangan subsidi BBM. Dalam rangka mengatasi dampak kenaikan harga BBM tersebut, Pemerintah merealokasikan

sebagian besar anggarannya ke empat program besar, yaitu program pendidikan, kesehatan, infrastruktur pedesaan, dan subsidi langsung tunai (SLT). Salah satu program di bidang pendidikan adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang menyediakan bantuan bagi sekolah dengan tujuan membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan meringankan bagi siswa lain. Pada prinsipnya program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dicetuskan sebagai upaya untuk meningkatkan akses masyarakat, khususnya siswa dari keluarga miskin atau kurang mampu terhadap pendidikan yang berkualitas dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 tahun.

Dalam pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diharapkan dapat mengurangi beban perekonomian masyarakat miskin, sehingga mereka dapat melanjutkan pendidikannya. Begitu pentingnya pendidikan bagi kemajuan bangsa diharapkan pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat dilaksanakan seadil-adilnya dan tepat pada sasaran yaitu siswa-siswi yang berhak atas Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yaitu peserta didik yang kurang mampu atau tidak mampu. Pemberian dana operasional sekolah yang tidak tepat sasaran sama saja membuang uang karena hal tersebut dapat menimbulkan penyelewengan, untuk mencegah hal tersebut, masyarakat harus mengawasi pelaksanaan dan penyaluran BOS.

Menurut ketentuan, dana BOS diterima oleh sekolah secara utuh, dan dikelola secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan dewan guru dan Komite Sekolah dengan menerapkan prinsip efisien, efektif, akuntabel. Sekolah boleh menggunakan dana BOS tersebut untuk beberapa jenis pengeluaran sesuai juklak program dan berdasarkan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKAS) yang disusun oleh sekolah dan Komite Sekolah. Namun hal demikian tidak berlaku di SDS It Ibu Harapan Bengkalis, dikarenakan seluruh jenis bantuan anggaran yang diperoleh semua diatur dan dikelola oleh yayasan. Baik dari segi pengeluaran untuk pembelian barang juga pada perlengkapan saran dan prasarana lainnya yang dapat menunjang dan membantu kelancaran suatu proses belajar mengajar siswa.

Dalam Peraturan dan Petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah reguler Bagian A Tentang Pengelolaan Dana BOS, Dana BOS Reguler dikelola oleh sekolah dengan menerapkan prinsip manajemen berbasis sekolah yaitu, kewenangan sekolah untuk melakukan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan program sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekolah, Sekolah memiliki kewenangan untuk menentukan penggunaan Dana BOS Reguler sesuai dengan prioritas kebutuhan sekolah dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan dana BOS reguler. Fakta dilapangan, seorang yang ditunjuk sebagai bendahara

sekolah tidak boleh dijadikan sebagai bendahara bos, supaya mempunyai keterbatasan dalam tanggung jawab masing-masing. Pernyataan ini sesuai dengan petunjuk teknis yang ada dalam peraturan menteri pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler dalam Pasal 2 Pengelolaan Dana BOS Reguler dilakukan berdasarkan prinsip:

1. fleksibilitas yaitu penggunaan Dana BOS Reguler dikelola sesuai dengan kebutuhan sekolah
2. efektivitas yaitu penggunaan Dana BOS Reguler diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di sekolah
3. efisiensi yaitu penggunaan Dana BOS Reguler diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal
4. akuntabilitas yaitu penggunaan Dana BOS Reguler dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai peraturan perundang-undangan.

Namun ditempat penelitian, bendahara bos dan bendahara sekoah dijadikan satu orang saja, kemudian segala hal yang menyangkut tentang keuangan akan kembali diatur oleh yayasan dan bukan dari pihak sekolah yang menentukan bagaimana pengelolaan dan penyaluran dana BOS yang diterima oleh sekolah yang dibawah naungan yayasan. Hal ini menunjukkan bahwa ada pelanggaran teknis yang dilakukan oleh pihak yayasan terhadap sekolah yang ada dibawah naungannya, seharusnya pihak yayasan memberikan hak penuh tentang pertanggungjawaban atas pengelolaan dana bos yang diterima oleh sekolah.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kadek Gita Puspita Saisarani tahun 2020 tentang Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sma Negeri 4 Singaraja menyatakan bahwa Kendala pengelolaan dana BOS di SMA Negeri 4 Singaraja yaitu waktu pencairan dana sering mengalami keterlambatan dan juga terdapat perubahan peraturan pengelolaan dana BOS sehingga pertanggungjawaban terhadap pelaporan realisasi anggaran menjadi terhambat. Juga penelitian yang dilakukan oleh Mujiono mengenai Dalam penyimpangan penggunaan dana BOS, terdapat sebagian modus yang pernah terjadi dan sedang terjadi di beberapa daerah di Indonesia seperti Pengelolaan dana BOS tidak sesuai dengan petunjuk teknis (Juknis) dan Dana BOS hanya dikelola oleh Kepala Sekolah dan Bendahara.

## **METODE PENELITIAN**

Teknik analisa data di dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu metode menggambarkan hasil penelitian dengan menelaah data yang diperoleh dari perusahaan kemudian dibandingkan dengan berbagai teori yang mendukung masalah penelitian. Dari hasil perbandingan tersebut diambil kesimpulan dan dilanjutkan dengan mengemukakan beberapa saran yang berguna bagi lokasi penelitian.

Analisis data kualitatif terdiri atas tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu:

### **1) Reduksi Data**

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data dilakukan selama penelitian berlangsung, setelah peneliti di lapangan, sampai laporan tersusun. Reduksi data merupakan bagian dari analisis data dengan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak diperlukan, dan mengorganisasi data sehingga kesimpulan final dapat diambil dan diverifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasi dengan berbagai cara, seleksi, ringkasan, penggolongan, dan bahkan kedalam angka-angka.

### **2) Penyajian Data**

Penyajian data merupakan alur kedua dalam kegiatan analisis data. Data dan informasi yang sudah diperoleh di lapangan dimasukkan kedalam suatu matriks, penyajian data dapat meliputi berbagai jenis matriks, grafik, jaringan, dan bagan.

### **3) Verifikasi dan Kesimpulan**

Begitu matriks terisi, maka kesimpulan awal dapat dilakukan. Sekumpulan informasi yang tersusun memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari suatu kegiatan. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Dalam penelitian kualitatif, prinsip pokok teknik analisisnya ialah mengolah dan menganalisa data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan mempunyai makna.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Analisis data yang digunakan yaitu metode kualitatif ini adalah sebagai berikut: Reduksi data adalah suatu proses sebagai pemilihan, penyederhanaan, dan pengabstrakan dari data yang diperoleh dan tertulis di lapangan. Reduksi data yang dilakukan selama penelitian ini berlangsung, setelah penelitian, sampai laporan selesai. Reduksi data merupakan bagian dari analisis data dengan suatu bentuk analisis yang terfokuskan, mengarahkan, dan mengorganisasikan data sehingga kesimpulan terakhir dapat diambil dan verifikasi.

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan dan dari hasil penelitian bahwa akuntabilitas dalam realisasi anggaran dana BOS di SDS IT Ibu Harapan Bengkalis belum sesuai dengan petunjuk teknis yang telah berlaku. dan juga bisa diambil kesimpulan adalah bendahara dan pihak sekolah hanya mengatasnamakan saja dalam laporan pertanggungjawaban, namun pengelolaan dan proses realisasi anggaran masih tetap keputusan dari pihak yayasan yang berwenang tentang sekolah-sekolah yang ada di lingkungannya.

Juga berdasarkan dari hasil penelitian tentang proses realisasi anggaran yang dilakukan oleh SDS IT Ibu Harapan Bengkalis belum menerapkan proses realisasi anggaran sesuai dengan petunjuk teknis, dikarenakan dalam laporan keuangan penggunaan dan BOS khususnya pada akun pembelian sarana dan prasarana bahan ajar yang belum maksimal, barang yang diperlukan tersebut juga dimasukkan dalam laporan bulanan dari hasil pendapatan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) yang diperoleh SDS IT Ibu Harapan Bengkalis sebesar Rp.250.000., per orangnya.

Akuntabilitas dan proses penyaluran dana BOS tidak disampaikan langsung dalam forum resmi seperti musyawarah dan rapat bulanan, evaluasi proses belajar mengajar yang terjadi sehingga menimbulkan rasa kecurigaan terhadap akuntabilitas dan proses penyaluran dana BOS yang berlaku di SDS IT Ibu Harapan Bengkalis.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tata Cara Pengelolaan Dan Pelaporan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Oleh Sekolah Bagian A tentang Pengelolaan Dana BOS adalah Dana BOS Reguler dikelola oleh sekolah dengan menerapkan prinsip manajemen berbasis sekolah yaitu,

- a. kewenangan sekolah untuk melakukan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan program sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekolah.
- b. Sekolah memiliki kewenangan untuk menentukan penggunaan Dana BOS Reguler sesuai dengan prioritas kebutuhan sekolah dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan Dana BOS Reguler.

- c. Sekolah memiliki kewenangan untuk menentukan penggunaan Dana BOS Reguler sesuai dengan prioritas kebutuhan sekolah dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan Dana BOS Reguler.
- d. Penggunaan Dana BOS Reguler hanya untuk kepentingan peningkatan layanan pendidikan di sekolah sesuai komponen penggunaan dana.
- e. Penggunaan Dana BOS Reguler harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara tim BOS Sekolah, guru, dan Komite Sekolah.
- f. Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat.
- g. Kesepakatan penggunaan Dana BOS Reguler sebagaimana dimaksud pada angka 6 harus didasarkan pada skala prioritas kebutuhan sekolah yang berorientasi pada pengembangan program peningkatan kualitas belajar Peserta Didik.

Bendahara.

Akuntabilitas realisasi anggaran dalam perencanaan keuangan yang dilakukan SDS IT Ibu Harapan Bengkalis melalui penyusunan RKAS pada tahun ajaran baru. Pihak yang terlibat dalam penganggaran sekolah adalah kepala sekolah, Bendahara, komite dan pihak yayasan yang menyusun rencana anggaran sesuai dengan JUKNIS. akuntabilitas dan pertanggungjawabannya masih kurang diterapkan dalam penggunaan dan penyaluran dana BOS yang ada di SDS IT Ibu Harapan Bengkalis

Disamping permasalahan-permasalahan tersebut diatas dalam penelitiannya Ristya Dwi Anggraeni (2013) mengungkapkan permasalahan yang muncul mengenai permasalahan pengelolaan dana BOS. Masalah baru muncul terkait dengan penyelewengan dana BOS, dan ketidakefektifan pengelolan dana BOS. Mulai dari pengalokasian dana tidak didasarkan pada kebutuhan sekolah tapi pada ketersediaan anggaran. Pada tingkat penyelenggara (Sekolah), tidak ada aturan mengenai mekanisme penyusunan anggaran Penyebab lain juga terjadi pada partisipasi masyarakat yang kurang karena tidak memiliki akses untuk mendapat informasi mengenai anggaran sehingga mereka tidak bisa melakukan pengawasan

Padahal sebenarnya dengan partisipasi guru dan staf SDS IT Ibu Harapan Bengkalis yaitu dengan mengajukan usulan kegiatan yang diperlukan yang akan dipertimbangkan saat penyusunan RKAS untuk satu tahun ajaran. SDS IT Ibu Harapan Bengkalis merupakan salah satu sekolah negeri di Kabupaten Bengkalis dengan pembukuan keuangan yang belum begitu baik menurut peneliti, serta laporan kegiatan dan anggaran yang ada belum di

publikasikan melalui laporan pertanggungjawab dana BOS yang belum tersedia diruang guru dan papan informasi sekolah. Dan juga belum tersedianya tim audit atau pengawas yang independen dari Kepala Cabang dinas, inspektorat daerah Provinsi Riau, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis.

## KESIMPULAN

Dari paparan pembahasan yang dibahas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa :

1. Akuntabilitas merupakan suatu keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan, bertanggungjawab, dan akuntabel. Dalam hal ini SDS IT Ibu Harapan Bengkalis belum begitu baik dalam menerapkan akuntabilitas dana Bantuan Operasional Sekolah(BOS) sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku, hal ini disebabkan segala hal yang menyangkut keuangan akan dikembalikan kepada yayasan sebagai pengurus sekolah. Sehingga keputusan apapun semua akan tergantung kepada pihak yayasan.
2. Proses realisasi atau penyaluran dana BOS terbagi menjadi 3 tahap yaitu Januari sampai April, Mei sampai Agustus, dan September sampai Desember. Namun dalam proses realisasi dan perolehan dana bos mengalami keterlambatan dan pengurangan terhadap penerimaan dana BOS pada tahun 2021 dikarenakan surat pertanggungjawaban mengalami keterlambatan dalam pelaporan sehingga dikenakan sanksi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis dan Pihak Pengelola dana BOS.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad. "Manajemen Sekolah Dasar Islam Terpadu." *Jurnal Ilmu Pendidikan* 22, no. 1 (2016).
- Alaydroes, Fahmi. "Profile JSIT Indonesia." *JSIT Indonesia*. Last modified 2013. <https://jsit-indonesia.com/sample-page/pengertian-sekolah-islam-terpadu/>.
- Departemen Agama RI. *Al Quran Terjemahan*. Bandung: CV Darus Sunnah, 2015.
- Dharma, Surya. *Manajemen Kinerja Falsafah Teori Dan Penerapannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Fathony, Aditya Achmad, and Feti Prianty. "Pengaruh Anggaran Pendidikan Dan Penggunaan Anggaran Dana BOS Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan Di SMP Negeri Se-Kecamatan Solokan Jeruk." *Jurnal Ilmiah Akuntansi* 10, no. 1 (2019).
- Fauzan. "Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Perilaku Etis Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah." *Jurnal Ekonomi Modernisasi* 10, no. 3 (2014).

- Hidayat, Lukman, and Suhandi Halim. "Analisis Biaya Produksi Dalam Meningkatkan Profitabilitas Perusahaan." *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan* 1, no. 2 (2013).
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. "Data Pokok Pendidikan." *Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi*. Last modified 2022. <https://dapo.kemdikbud.go.id/sekolah/C54112ADE6BFDCBEFF1A>.
- Martani, Dwi, Sylvia Veronica Siregar, Ratna Wardhani, Aria Parahmita, and Edward Tanujaya. *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*. Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- Mujiono. "Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)." *Jurnal Ilmu Manajemen* 4, no. 2 (2017).
- Nasioal, Menteri Pendidikan. *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 69 Tahun 2009 Tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (S. Indonesia, 2009*.
- Rahmayani, Indah. "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Implementasi Pengelolaan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara." *Universitas Medan Area*. Universitas Medan Area, 2018.
- Saisarani, Kadek Gita Puspita, and Ni Kadek Sinarwati. "Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di SMA Negeri 4 Singaraja Tahun 2020." *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika* 11, no. 2 (2021).
- Shafratunnisa, Fierda. "Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Kepada Stakeholders Di SD Islam Binakheir." *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*, 2015.
- Siregar, Syofian. *Statistik Deskriptif Untuk Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Sudaryanti, Dwiyani. "Akuntansi Dalam Perspektif Islam: Solusi Masalah Korupsi Di Indonesia." *Tera Ilmu Akuntansi* 10, no. 1 (2011).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Sujarweni, V. Wiratna. *Pengantar Akuntansi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2016.
- Tandi, Victor P., Parengkuan Tommy, and Victoria N. Untu. "Pengaruh Struktur Modal Dan Pertumbuhan Aset Terhadap Profitabilitas Perusahaan Otomotif Yang Terdaftar Di BEI Periode 2013 – 2016." *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 6, no. 2 (2018): 629–637.
- Tarigan, Tiara Uli Yasa. "Analisis Anggaran Biaya Prduksi Sebagai Alat Perencanaam Dan Pengawasan Pada PT. Amal Tani Bahorok Kabupaten Langkat." *Universitas Medan Area*, 2019.
- Triuwono, Iwan. *Perspektif, Metodologi, Dan Teori Akuntansi Syari'ah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Wicaksono, Kristian Widya. "Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik." *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)* 19, no. 1 (2015).
- Yanti, Ni Luh Tina. "Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Bos Di SMP N 3 Sukawati Dalam Program RKAS." *Hita Akuntansi dan Keuangan* 2, no. 3 (2021).

Zuhri, Damanhuri. "10 Tahun JSIT Indonesia Bangun Pendidikan Lewat SIT."  
*REPUBLIKA.CO.ID*. Last modified 2014.  
<https://www.republika.co.id/berita/n08dcm/10-tahun-jsit-indonesia-bangun-pendidikan-lewat-sit>.